

## EVALUASI KUALITAS INFORMASI SITUS WEB PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA

### EVALUATION FOR QUALITY OF INFORMATION THE JAYAWIJAYA REGENCY GOVERNMENT WEBSITE

Gasper Tabuni<sup>1</sup>, Teguh Priyantoro<sup>2\*</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Sistem Informasi STMIK Agamua Jl. SD Percobaan Wamena Papua

<sup>2</sup> Program Studi Teknik Komputer STMIK Agamua Jl. SD Percobaan Wamena Papua

\*E-mail: [teguhpriyantoro@yahoo.com](mailto:teguhpriyantoro@yahoo.com)

#### ABSTRAK

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya sejak lama memiliki Situs Web dengan nama domain <http://www.jayawijayakab.go.id>. Dalam pemanfaatannya ditemukan kurang efektif yang mengakibatkan kurang optimalnya dalam ketersediaan data dan informasi layanan publik. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk dievaluasi dan memberikan rekomendasi kepada para pengambil kebijakan agar melakukan langkah-langkah penyempurnaan secara taktis dan strategis, agar website ini lebih efektif. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan dan menggambarkan isi konten Situs Web menggunakan dua instrumen, yaitu: (1) menggunakan standar isi Situs Web Pemerintah Daerah yang ditetapkan Depkominfo dan (2) menggunakan 20 dimensi kualitas informasi menurut Knight & Burn. Evaluasi tersebut dilakukan per-tanggal 1 Juli sampai 6 Agustus 2019. Berdasarkan hasil Evaluasi Kualitas Informasi ditarik kesimpulan bahwa, Situs Web Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya belum cukup menyediakan informasi yang berkualitas bagi publik dan kualitas kontennya belum memenuhi standar yang ditetapkan Depkominfo.

**Kata kunci:** e-Government, Kualitas Informasi

#### ABSTRACT

Jayawijaya Regency Government has long had a Website with a domain name <http://www.jayawijayakab.go.id>. In its use it was found to be less effective which resulted in less than optimal availability of data and information on public services. Therefore, it is deemed necessary to evaluate and provide recommendations to policy makers to make tactical and strategic improvement steps, so that this website is more effective. The study was conducted using qualitative descriptive methods, describe the contents of the Website content using two instruments, namely: (1) using the content standards of the Local Government Website set by the Ministry of Communication and Information and (2) using 20 dimensions of information quality according to Knight & Burn. The evaluation is conducted from July 1<sup>st</sup> to August 6<sup>th</sup>, 2019. Based on the results of the Information Quality Evaluation, conclusions can be drawn that; The Jayawijaya Regency Regional Government Website has not provided enough quality information for the public and the quality of the content does not meet the standards set by the Ministry of Communication and Information.

**Keywords:** e-Government, Quality Of Information

#### PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi ekonomi, politik dan teknologi yang semakin maju dan berkembang pesat menuntut penyelenggaraan pemerintahan berorientasi pada *Good Government and Clean Government*. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Pemerintah Indonesia dari tingkat pusat hingga daerah diwajibkan menerapkan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi dan

akuntabilitas layanan publik dan proses bisnis pemerintahan, baik dalam konteks hubungan antara pemerintah dengan pemerintah (G2G), pemerintah dengan bisnis (G2B), pemerintah dengan para ASN (G2E) maupun pemerintah dengan masyarakat (G2C). Penerapan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi pada organisasi pemerintahan lebih populer kita kenal dengan istilah “e-Government”. Salah satu layanan *e-Government* yang wajib dimiliki oleh pemerintah adalah Situs Web.

Layanan Situs Web merupakan salah satu aspek penting dalam *e-Government*, diibaratkan seperti membangun sebuah rumah harus dimulai dengan pembangunan pondasi rumah, demikian pula dalam pembangunan aplikasi *e-Government* terlebih dahulu harus membangun situs web. Pada umumnya Situs Web berisi tentang profil pemerintahan, struktur organisasi, visi-misi, program kerja, strategi pembangunan, berita/pengumuman, link situs web unit organisasi, link layanan *e-Government*, laporan pertanggungjawaban anggaran, dokumen perencanaan dan sebagainya. Konten yang terdapat dalam Situs Web juga diharuskan memiliki nilai kualitas yang baik dan tersedia secara *real-time*. Namun tidak semua organisasi pemerintahan mampu mewujudkan hal tersebut karena diselimuti berbagai persoalan.

Berdasarkan hasil penelitian dan audit *e-Government* pada tingkat pemerintah daerah tampak bahwa rata-rata Situs Web pemerintahan berada pada tingkat pertama (persiapan), hanya sebagian kecil yang telah mencapai tingkat dua (pematangan), sedangkan tingkat tiga (pemanfaatan) dan empat (pemanfaatan) belum tercapai[1]. Hal tersebut dipengaruhi oleh kompleksitas persoalan di Indonesia, seperti ketidakmerataan sarana dan prasarana, rendahnya kualitas sumber daya manusia, angka kemiskinan tinggi, kondisi perekonomian yang tidak stabil, kondisi perpolitikan nasional semakin buruk, kinerja aparatur pemerintahan yang buruk dan sebagainya.

Dalam penelitian Sitokdana, Melkior menemukan bahwa Situs Web Pemerintah Daerah di pulau Jawa lebih baik dibandingkan dengan wilayah lain, termasuk Kota Jayapura yang dijadikan sebagai studi kasus disebutkan bahwa Situs Webnya belum memenuhi standar yang disyaratkan regulasi, padahal seyogyanya Pemerintah Kota Jayapura sebagai kota tertua mestinya menjadi barometer pengembangan *e-Government* di Tanah Papua. Walaupun dari segi kuantitas perkembangan Situs Web pemerintah daerah memang meningkat pesat, namun dari segi kualitas masih belum optimal, tidak semua situs web pemerintah daerah menyediakan fasilitas pelayanan publik yang berstandar. Lebih banyak pemerintah daerah membuat situs semata-mata untuk memenuhi persyaratan tuntutan keterbukaan informasi publik tanpa adanya perubahan manajemen kerja pemerintahan yang berbasis pada elektronik[2].

Untuk itu, penelitian ini dilakukan dengan maksud guna mengevaluasi kualitas Situs Web Pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Pemerintah Daerah Jayawijaya sejak lama memiliki Situs Web dengan nama domain <http://www.jayawijayakab.go.id>. Situs Web tersebut berisi menu beranda, subdomain, profil daerah, pemerintahan, informasi, dokumen dan berita. Berdasarkan penelusuran ditemukan berbagai kekurangan dan kelemahan yang perlu dievaluasi dan diberikan rekomendasi kepada pengambil kebijakan. Suatu ketika melakukan wawancara terbatas dengan bidang teknis yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan Situs Web tersebut pihaknya mengatakan selama ini belum pernah ada evaluasi terhadap kualitas Situs Web. Oleh karena itu, menarik untuk dievaluasi dan diberikan rekomendasi kepada para pemangku kepentingan agar dilakukan langkah-langkah pembaharuan secara taktis dan strategis.

Untuk menjawab permasalahan seperti itu, penelitian ini menggunakan dua instrumen sebagai bahan evaluasi kualitas Situs Web Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, yaitu: (1) menggunakan standar isi Situs Web Pemerintah Daerah yang ditetapkan Depkominfo dan (2) menggunakan 20 (dua puluh) dimensi kualitas informasi menurut Knight & Burn[3] mengutip sebagian dimensi dari Wang & Strong [4]. Dengan evaluasi tersebut dapat mengidentifikasi kelemahan, eksplorasi solusi dan rekomendasi untuk perumusan strategi pengembangan *e-Government* Kabupaten Jayawijaya secara tepat, tepat dan berkesinambungan.

Penelitian dengan topik evaluasi Situs Web Pemerintah Daerah di Indonesia bukanlah merupakan topik baru, maka beberapa penelitian terdahulu dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini, antara lain; Penelitian Sitokdana, Melkior berjudul "Evaluasi Implementasi *e-Government* Pada Situs Web Pemerintah Kota Surabaya, Kota Medan, Kota Banjarmasin, Kota Makassar dan Kota Jayapura". Beberapa indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas Situs Web, yaitu aspek transparansi, layanan, efisiensi, ekonomi, aspirasi, tampilan, update dan tahapan pencapaian tujuan *e-Government*. Hasil penelitiannya disimpulkan bahwa: Kota Surabaya jauh lebih baik dibanding Kota-kota lainnya. Hasil ini sama dengan evaluasi Pemingkatan *e-Government* Indonesia (PeGi) dari tahun 2012-2014 bahwa dalam pemingkatan Situs Web *e-Government*

selama ini hanya didominasi oleh pemerintahan di Pulau Jawa. Untuk itu, direkomendasikan beberapa hal untuk peningkatan kualitas Situs Web *e-Government*, yaitu perlu penyempurnaan konten Situs Web, namun sebelumnya aspek *e-Leadership*, Infrastruktur Jaringan Informasi, Pengelolaan Informasi, Lingkungan Bisnis, Masyarakat dan Sumber Daya Manusia dapat dirumuskan dengan baik dalam bentuk Rencana Strategis, agar pengembangan dan implementasinya dilakukan secara menyeluruh dan tepat sasaran[2].

Indikator yang sama digunakan Tonggiroh, Mursalim dalam jurnalnya berjudul "Digital Government Services in Papua" dalam mengevaluasi Situs Web Pemerintah Provinsi Papua, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke dan Kabupaten Jayawijaya. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa implementasi *e-Government* di Papua masih jauh di bawah standar ideal. Dalam hal kompleksitas dan waktu, layanan *e-Government* pemerintah daerah di Provinsi Papua telah mencapai tahap Interaksi. Sementara hasil pengukuran tingkat kinerja dan efektivitas *e-Government* menunjukkan bahwa layanan tersebut belum memberikan manfaat yang signifikan terhadap pengunjung[5].

Penelitian Damanik, Marudur P. berjudul "E-Government dan Aplikasinya di Lingkungan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kualitas Informasi Website Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau)". Penelitian tersebut bertujuan untuk mengukur kualitas informasi website Pemerintah Kabupaten Bengkalis berdasarkan dimensi Akurasi, Kelengkapan, Kebaharuan, Relevansi dan Ketersediaan. Pengamatan terhadap 4 (empat) website di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dilakukan beserta wawancara mendalam kepada masing-masing pengelolanya. Hasil yang diperoleh bahwa informasi yang tersedia di website Pemerintah Kabupaten Bengkalis sudah memenuhi kualitas informasi yang baik, meskipun terdapat beberapa kekurangan seperti adanya tautan (link) ke halaman kosong, sebagian penanggalan informasi yang belum tercantum, dan belum adanya jaminan kualitas jaringan untuk memastikan ketersediaan informasi[6].

## METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode tersebut menurut Nawawi dan Martini adalah penelitian yang

menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya[7]. Sedangkan menurut Mukhtar mengatakan Penelitian deskriptif kualitatif berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan[8]. Dalam konteks penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menggambarkan isi konten Situs Web menggunakan dua instrumen, yaitu: (1) Menggunakan standar isi Situs Web Pemerintah Daerah yang ditetapkan Depkominfo dan (2) Menggunakan 20 (dua puluh) dimensi kualitas informasi menurut Knight & Burn, yaitu Akurasi, Konsistensi, Keamanan, Ketepatan waktu, Kebaharuan, Kelengkapan, Ringkas, Keandalan, Keterjangkauan, Ketersediaan, Objektifitas, Relevansi, Kemudahan penggunaan, Jumlah data, Kepercayaan, Navigasi, Reputasi, Manfaat, Efisiensi dan Nilai tambah [3]. Penelitian tersebut menggunakan sumber data sekunder, yaitu kajian terhadap literatur, artikel, jurnal serta pengamatan dan penelusuran secara mendalam terhadap isi konten Situs Web Pemerintah Jayawijaya, yaitu <http://www.jayawijayakab.go.id>. Evaluasi terhadap kualitas informasi dilakukan per-tanggal 1 Juli sampai 6 Agustus 2019.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Standar Situs Web Pemerintah Daerah

Terdapat tujuh menu halaman Situs Web Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, yaitu Beranda, Subdomain, Profil Daerah, Pemerintahan, Informasi, Dokumen dan Berita. Setiap halaman dapat dijelaskan sebagai berikut; (1) Beranda adalah tampilan depan dari Situs Web. Pada halaman ini menampilkan berbagai berita terbaru, pengumuman penting, link aplikasi *e-Government* yaitu Aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Situs Web Dinas Komunikasi dan Informatika, Situs Web Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda, Aplikasi *e-Planning* Jayawijaya, Situs Web BAPPEDA dan Situs Web JDIH Bagian Hukum (offline). Selain itu, menampilkan link dokumen arsip berdasarkan tahun dan kategorisasi berita berdasarkan berita, lintas OPD, kesehatan, pendidikan, warga, wisata, artikel dan pengumuman.

(2) Subdomain adalah link Situs Web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL). (3) Profil Daerah berisi sub

menu Sejarah Singkat tetapi tidak terdapat informasi, hanya berisi pesan “Maaf!! Halaman yang anda minta saat ini tidak tersedia”. Sama halnya pada Menu halaman Pemerintahan dan Informasi. Dokumen merupakan halaman khusus untuk menampilkan dokumen tentang penganggaran, data strategis, laporan, standar pelayanan minimal, kelembagaan dan produk umum. Namun tampak bahwa data-datanya belum diunggah, sementara yang ada hanya tampilan hanya berisi link dokumen, link *download* dan *folder* tanpa dokumen yang bisa diakses oleh publik. Berita adalah halaman khusus yang menampilkan Daftar Arsip Berita dari tahun 2008 sampai 2019. Dalam Daftar Arsip Berita diurutkan berdasarkan tanggal publikasi dan link judul berita tetapi tidak dapat menampilkan isi beritanya.

Mengacu pada standar tersebut, maka konten yang harus ada dalam sebuah Situs Web Pemerintah Daerah adalah Selayang Pandang, Pemerintahan Daerah, Geografi, Peta Wilayah dan Sumberdaya, Peraturan/Kebijakan Daerah serta Buku Tamu. Standar konten tersebut dijadikan acuan utama dalam menilai Situs Web Pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Berikut adalah hasil analisis dan rekomendasi peneliti berdasarkan standar yang ditetapkan Depkominfo [9], yaitu; (1) Selayang Pandang, yaitu menjelaskan secara singkat tentang keberadaan Pemerintah Daerah bersangkutan (sejarah, motto daerah, lambang dan arti lambang, lokasi dalam bentuk peta, visi dan misi). “Pada Situs Web Pemerintah Kabupaten Jayawijaya belum tersedia informasi tersebut, semestinya ditampilkan pada halaman Profil Daerah atau merubah nama halaman menjadi Selayang Pandang dan menambahkan sub-sub menu sebagaimana yang disyaratkan Depkominfo”.

(2) Pemerintahan Daerah, yaitu menjelaskan struktur organisasi yang ada di Pemerintah Daerah bersangkutan (eksekutif, legislatif) beserta Nama, alamat, telepon, e-mail dari pejabat daerah. Jika memungkinkan biodata dari Pimpinan Daerah ditampilkan agar masyarakat luas mengetahuinya. “Pada Situs Web Pemerintah Kabupaten Jayawijaya terdapat halaman Pemerintahan tetapi tidak ada data, semestinya ditambahkan lagi sub menu Profil Pimpinan Daerah, Struktur Organisasi, Sambutan, Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintahan (Wilayah Administrasi), Distrik dan Kampung, Prestasi dan Penghargaan, dan sebagainya. Selain itu dibuatkan sub halaman Profil Legislatif atau DPRD dibuatkan Situs

Web Sendiri yang di-link-kan dengan Situs Web Utama”. (3) Geografi, yaitu menjelaskan antara lain tentang keadaan topografi, demografi, cuaca dan iklim, sosial dan ekonomi, budaya dari daerah bersangkutan. Semua data dalam bentuk numeris atau statistik harus mencantumkan Nama instansi dari sumber datanya. “Pada Situs Web Pemerintah Kabupaten Jayawijaya tidak terdapat halaman khusus tentang Geografi dan konten tersebut. Rekomendasinya dibuat halaman tersendiri atau masukkan sebagai sub halaman pada Selayang Pandang/Profil Daerah”.

(4) Peta Wilayah dan Sumberdaya, yaitu menyajikan batas administrasi wilayah dalam bentuk peta wilayah (sebaiknya digunakan peta referensi yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional-Bakosurtanal, atau instansi pemerintah lainnya yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembuat peta), dan juga sumberdaya yang dimiliki oleh daerah bersangkutan dalam bentuk peta sumberdaya (digunakan peta referensi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembuat peta) yang dapat digunakan untuk keperluan para pengguna. “Pada Situs Web Pemerintah Kabupaten Jayawijaya tidak terdapat halaman khusus tentang Peta Wilayah dan Sumberdaya, dan juga tidak terdapat konten tersebut. Rekomendasinya dibuat halaman tersendiri atau masukkan sebagai sub halaman pada Selayang Pandang/Profil Daerah”.

(5) Peraturan/Kebijakan Daerah, yaitu; menjelaskan Peraturan Daerah (Perda) yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah bersangkutan. Melalui situs web pemerintah daerah inilah semua Perda yang telah dikeluarkan dapat disosialisasikan kepada masyarakat luas. “Pada Situs Web Pemerintah Kabupaten Jayawijaya tidak terdapat halaman khusus tentang Peraturan/Kebijakan Daerah, tetapi konten tersebut termasuk dalam halaman Dokumen yang menampilkan data penganggaran, data strategis, laporan, standar pelayanan minimal, kelembagaan dan produk umum. Namun sebagaimana disebutkan bahwa tidak tersedia data dan informasi. Termasuk dalam Situs Web tersebut terdapat link Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum tetapi web-nya tidak tersedia. Oleh karena itu rekomendasinya adalah (1) komitmen dan konsistensi dalam menyediakan data secara realtime. (2). Meningkatkan Transparansi dengan melakukan Publikasi Kinerja OPD,

Publikasi Rencana (Rencana Kerja, Rencana Aksi, Rencana Strategis, RPJPD, RPJMD, RKPD) publikasi laporan (LKPI, LAKIP, LKPD, RAPPBD, APBD) dan laporan Penyaluran Serta Penggunaan Dana Hibah dan Bansos. (6) Buku Tamu, yaitu tempat untuk menerima masukan dari pengguna situs web pemerintah daerah bersangkutan. “Pada Situs Web Pemerintah Kabupaten Jayawijaya tidak terdapat Buku Tamu. Hanya tersedia kontak yang berisi alamat Kantor dan email Dinas Komunikasi dan Informatika. Oleh karena itu, perlu dibuatkan halaman khusus kontak atau disediakan fasilitas aspirasi atau pengaduan masyarakat”.

Kemudian direkomendasikan supaya dibuat halaman khusus tentang Informasi layanan publik. Halaman tersebut berisi tentang informasi prosedur layanan publik, seperti: (1) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Akta Kematian, Legalisasi Dokumen Kependudukan, Pembatalan Akta Capil, Akta Perceraian, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Surat Keterangan Tempat Tinggal). (2) Pendapatan Daerah (Bea dan Retribusi, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, Pajak Hotel, dsb). (3) Ketenagakerjaan dan Sosial (Izin pendirian Panti Asuhan, Izin Pendirian Lembaga Latihan Kerja, Izin Penggunaan Peralatan K3, Rekomendasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dsb). (4) Rumah Sakit (Pelayanan RSUD dan IGD), (5) Perizinan, (6) Kesehatan (BPJS dan Jamkesmas) dan sebagainya.

Berdasarkan hasil evaluasi menggunakan instrumen Standar Situs Web Pemerintah Daerah yang ditetapkan Depkominfo dapat ditarik kesimpulan bahwa Situs Web Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya belum memenuhi standar, hal tersebut dinilai dari menu-menu dan sub menu yang tersedia masih terbatas dan tidak tersedia data dan informasi pada masing-masing halaman.

### **Analisis Kualitas Situs Web Pemerintah Kabupaten Jayawijaya**

Berikut analisis kualitas Situs Web Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dengan menggunakan 20 (dua puluh) dimensi analisis: (1) Evaluasi aspek akurasi yaitu terdapat banyak kesalahan dalam pengaturan konten dan pengelolaan data dan informasi. Seperti pada menu *subdomain* mestinya dimasukkan pada link aplikasi *e-Government*

pojok kiri bawah. Selain itu, pengelolaan Daftar Arsip Berita juga masih dicampur dengan data-data non-berita. Sedang rekomendasinya yaitu memperbaiki navigasi dan menu-menu sesuai dengan standar regulasi. Mengelola data dan informasi berdasarkan kategorisasinya. (2) Evaluasi aspek konsistensi yaitu Belum konsisten dalam pengaturan navigasi, menu-menu dan isi konten. Seperti, sebagian fungsi belum bisa diakses. Demikian pula tidak konsisten dalam penyediaan data dan informasi, hal tersebut ditemukan melalui Arsip Berita dari tahun 2008 sampai 2019. Sedang rekomendasinya yaitu Menata kembali navigasi dan link-link yang tidak berfungsi serta mengupdate informasi secara real time. (3) Evaluasi aspek keamanan yaitu kondisi Situs Web saat ini tidak dikelola dengan baik sehingga berpotensi dibobol dan disalahgunakan oleh pihak lain. Rekomendasinya memperbaharui sistem keamanan Situs Web dan melakukan kontrol secara kontinu.

(4) Evaluasi aspek ketepatan waktu yaitu Data dan informasi yang disediakan selama ini tidak tepat waktu dan bermanfaat bagi publik, berita dan pengumuman yang seharusnya publik ketahui terlebih dahulu, namun terkadang informasi yang dibagikan dalam waktu yang singkat serta terlambat dipublikasi. Rekomendasinya yaitu berita dan pengumuman harus update. Data laporan pertanggungjawaban anggaran dan program, regulasi, kebijakan dan layanan publik harus di update. (5) Evaluasi aspek kebaruan yaitu Data dan informasi tidak tersedia, tidak diperbaharui setiap waktu, yang tersedia-pun tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Rekomendasinya yaitu menyempurnakan konten yang sudah ada dan konsisten dalam mengupdate data dan informasi secara realtime dan berkala. (6) Evaluasi aspek kelengkapan yaitu konten yang tersedia belum lengkap dan belum memenuhi standar yang ditetapkan Depkominfo. Rekomendasinya yaitu melengkapi navigasi dan isi konten sesuai dengan ketentuan regulasi.

(7) Evaluasi aspek ringkas yaitu idealnya informasi dan data yang tersedia singkat, padat dan jelas. Namun pada Situs Web tersebut datanya belum padat dan jelas. Rekomendasinya yaitu data dan informasi yang disediakan ringkas, padat dan jelas. (8) Evaluasi aspek kehandalan yaitu informasi belum dapat diandalkan oleh publik. Rekomendasinya yaitu Menjadikan Situs Web sebagai sarana utama informasi publik. (9)

Evaluasi aspek keterjangkauan yaitu situs eeb tersebut belum menjangkau publik karena belum tersedia data dan informasi yang dibutuhkan. Selain itu, hanya diakses oleh kalangan tertentu. Rekomendasinya yaitu memanfaatkan Situs Web untuk menjangkau informasi layanan publik dan memastikan masyarakat selalu mengakses informasi dan layanan pemerintahan melalui Situs Web. (10) Evaluasi aspek ketersediaan yaitu data dan informasi tidak dapat diakses setiap saat. Rekomendasinya yaitu memastikan data dan informasi tersedia secara berkala.

(11) Evaluasi aspek objektifitas yaitu belum objektif dalam menyediakan data. Rekomendasinya yaitu menyediakan data dan informasi yang sudah terverifikasi keabsahannya. (12) Evaluasi aspek relevansi yaitu informasi yang tersedia tidak relevan dengan kebutuhan publik dan pemerintah sendiri. Rekomendasinya yaitu menyediakan informasi dan data yang relevan dengan kebutuhan dan kepentingan publik. (13) Evaluasi aspek kemudahan penggunaan yaitu data dan informasi tidak lengkap dan update sehingga belum optimal dalam pemanfaatannya. Rekomendasinya yaitu memastikan publik dapat mengakses data dan informasi dengan mudah. (14) Evaluasi aspek jumlah data yaitu jumlah data dan informasi yang tersedia sangat terbatas. Rekomendasinya yaitu melengkapi data-data yang kurang.

(15) Evaluasi aspek kepercayaan yaitu data dan informasi yang tersedia belum sepenuhnya dipercaya dan dijadikan sebagai acuan karena inkonsistensi dalam penyediaannya. Rekomendasinya yaitu senantiasa meyakinkan publik dengan menyediakan informasi dan data secara cepat, tepat dan akurat. (16) Evaluasi aspek navigasi yaitu navigasi dan link belum bisa dihubungkan ke informasi lain. Seperti menu Profil Daerah, Pemerintahan dan informasi belum bisa diakses (error). Demikian pula sebagian link-link pada halaman berita dan arsip belum berfungsi. Rekomendasinya yaitu menata navigasi secara rapi dan pastikan semua berfungsi dengan baik. (17) Evaluasi aspek reputasi yaitu data dan informasi yang tersedia belum cukup dijadikan sebagai rujukan terpercaya. Rekomendasinya yaitu menyediakan data dan informasi lengkap secara berkala agar senantiasa dijadikan sebagai rujukan dalam pembangunan.

(18) Evaluasi aspek manfaat yaitu informasi yang tersedia tidak membantu masyarakat dan pihak bisnis dalam mengakses

layanan publik dan informasi pembangunan daerah. Rekomendasinya yaitu mengutamakan data dan informasi yang bermanfaat bagi kepentingan publik. (19) Evaluasi aspek efisiensi yaitu keberadaan Situs Web dan isi konten yang ada belum cukup memudahkan tugas-tugas pemerintahan dan mengefisienkan masyarakat mengakses layanan publik. Rekomendasinya yaitu menyediakan data dan informasi layanan publik dengan memastikan masyarakat dapat mengakses secara cepat, mudah dan murah. (20) Evaluasi aspek nilai tambah yaitu data dan Informasi yang tersedia pada Situs Web saat ini tidak memberikan nilai tambah bagi publik maupun juga internal Pemerintahan. Rekomendasinya yaitu menjadikan Situs Web sebagai medium utama terwujudnya efesiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas layanan terhadap publik.

Dengan demikian, berdasarkan hasil evaluasi kualitas informasi menggunakan 20 (dua puluh) dimensi di atas, menunjukkan bahwa Situs Web Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya belum serius dan konsisten dalam menyediakan data dan informasi yang berkualitas bagi kepentingan layanan publik dan administrasi pemerintahan. Oleh karena itu, dalam dirumuskan rekomendasi-rekomendasi yang bisa dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan Situs Web Kabupaten Jayawijaya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Evaluasi Kualitas Informasi *e-Government* di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Situs Web Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya belum cukup menyediakan informasi yang berkualitas bagi publik dan kualitas kontennya belum memenuhi standar yang ditetapkan Depkominfo. Hal tersebut dinilai tidak berfungsinya sebagian navigasi dan menu, ketidaktersediaan data dan informasi yang dibutuhkan publik dan belum konsisten dan serius dalam mengelola Situs Web.

Oleh karena itu, beberapa poin rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, khususnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait adalah (1) Dibutuhkan komitmen yang kuat dan konsisten dalam mengelola Situs Web, (2) Menyempurnakan navigasi dan menu-menu yang belum berfungsi disesuaikan dengan regulasi, (3) Menyediakan data dan informasi layanan publik secara realtime, (4) Memastikan seluruh masyarakat dapat mengakses informasi publik

di Situs Web secara efektif dan efisien, (5) Memastikan Situs Web tersebut memberikan manfaat dan nilai tambah bagi publik dan pemerintah sendiri.

## SARAN

Saran untuk penelitian lebih lanjut adalah perlu dilakukan evaluasi tata kelola teknologi informasi secara khusus pada OPD yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan Situs Web dan *e-Government* pada umumnya. Kemudian penelitian selanjutnya menyusun Rencana Strategis Pengembangan *e-Government* secara holistik dan komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] E. A. Sosiawan, "Tantangan dan Hambatan Dalam Implementasi E-Government di Indonesia." *SemnasIF*, pp. 99–108, 2008.
- [2] M. N. N. Sitokdana, "Evaluasi Implementasi e-Government Pada Situs Web Pemerintah Kota Surabaya, Medan, Banjarmasin, Makassar dan Jayapura," *J. Buana Inform.*, vol. 6, no. 4, pp. 289–300, 2015.
- [3] S. Knight and J. Burn, "Developing a Framework for Assessing Information Quality on the World Wide Web Introduction – The Big Picture What Is Information Quality?," *Informing Sci. J.*, vol. 8, pp. 159–172, 2005.
- [4] D. M. Wang, R.Y. & Strong, "Beyond accuracy: What data quality means to data consumers," *J. Manag. Inf. Syst.*, p. 533, 1996.
- [5] Mursalim Tonggiroh, "Digital Government services in Papua," in *2017 Second International Conference on Informatics and Computing (ICIC)*, 2017.
- [6] M. P. Damanik, "e-Government Dan Aplikasinya Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kualitas Informasi Website Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau)," *J. Stud. Komun. dan Media*, vol. 21, pp. 151–164, 2017.
- [7] N. dan M. M. Hardani, *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: *Gadjah Mada University Press*, 1996.
- [8] Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta Selatan: *GP Press Group*, 2013.
- [9] Depkominfo, "Panduan Penyelenggaraan Situs Web Pemerintah Daerah." 2003.